



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TAHUN 2017

I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama;
- c. penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;

- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
- f. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, serta penerapan budaya kerja kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 4 (empat) unit Eselon III, yaitu:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri;

- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sarana dan prasarana industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pemberdayaan industri.

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana Industri; dan
- c. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri

2. Bagian Peraturan Perundang-undangan II

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perencanaan, serta bidang penunjang lain;

- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang terkait industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Peraturan Administrasi;
- b. Subbagian Peraturan Lintas Sektoral; dan
- c. Subbagian Perjanjian.

3. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di lingkungan kementerian;
- b. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan

- c. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Sistem Informasi Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, perumusan dan pengembangan jabatan fungsional, sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, penerapan budaya kerja kementerian, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan penerapan budaya kerja kementerian; dan

- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:

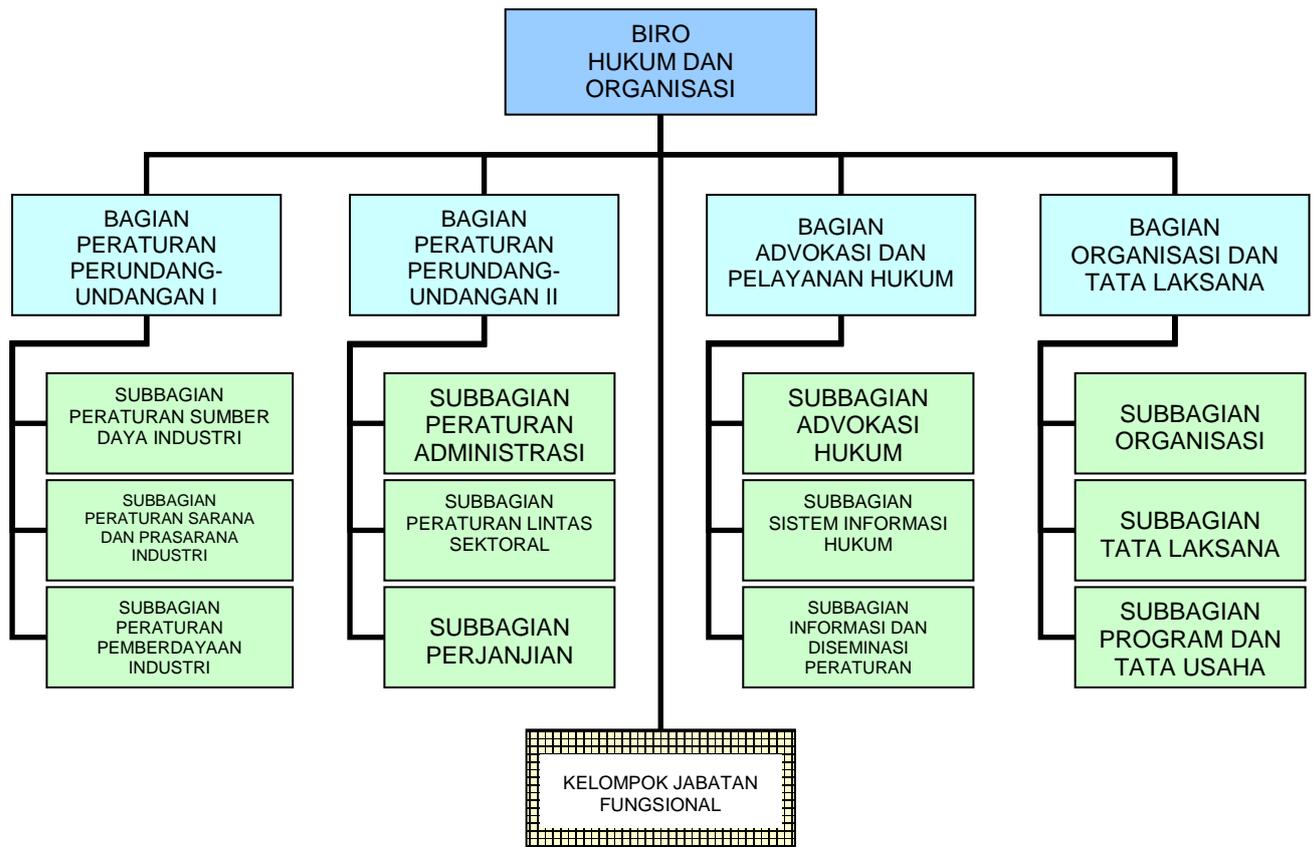
- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di Biro Hukum dan Organisasi, adalah:

- a. Jabatan Fungsional Pustakawan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan; dan
- b. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, seluruh bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Bagan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

I.2. PERAN STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Biro Hukum dan Organisasi dalam pembangunan industri adalah sebagai unit kerja pendukung Kementerian Perindustrian adalah:

1. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga dapat tersusun peraturan perundang-undangan bidang industri dan terkait industri yang mendukung perkembangan industri di Indonesia.

2. Melaksanakan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya
3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga dapat tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Dengan menjalankan tugas tersebut, diharapkan akan dapat:

- a) Menciptakan kebijakan industri yang berkualitas;
- b) Mewujudkan layanan informasi dan bantuan hukum yang prima; dan
- c) Mewujudkan organisasi Kementerian yang dinamis dan professional.

BAB



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi telah sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019 Perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud, Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian. Salah satu bentuk dukungan manajemen tersebut adalah Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi, yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi memiliki Sasaran Kegiatan, indikator, dan target untuk tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Layanan Legislasi	Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	95%
		Jumlah laporan evaluasi produk hukum dan instrumen hukum lainnya bidang industri	5 Dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah laporan layanan informasi dan publikasi hukum	1 Dokumen
2.	Layanan Litigasi	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	95%
3.	Layanan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat efektivitas organisasi kementerian	80%
		Jumlah laporan penataan organisasi dan tata laksana	1 Dokumen
		Persentase penyusunan proses bisnis Kementerian Perindustrian	80%
4.	Layanan Internal	Jumlah bulan pelaksanaan layanan internal	12 Bulan

Sedangkan yang menjadi **Indikator Kinerja Utama** dari Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan;
2. Persentase kasus hukum yang diselesaikan; dan
3. Tingkat efektivitas organisasi Kementerian.

II.2. RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Sasaran kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri;
2. meningkatnya kualitas layanan advokasi dan pertimbangan hukum;
3. meningkatnya kualitas layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
4. tersedianya laporan manajemen kinerja biro hukum dan organisasi.

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017 terdiri atas:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri, dengan target 95%;
2. Evaluasi produk hukum bidang industri, dengan target 5 laporan;
3. Terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi, dengan target 1 laporan;
4. Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani, dengan target 95%;
5. Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana, dengan target 1 laporan;
6. Layanan operasional dan manajemen kinerja biro, dengan target 1 laporan.

Indikator tersebut di atas dicapai melalui aktifitas sebagai berikut:

NO.	Indikator Kinerja	Aktifitas
1.	Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	1.1. Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri
		1.2. Menyusun Program Legislasi Kementerian Perindustrian
		1.3. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
		1.4. Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
		1.5. Berpartisipasi Dalam Sidang Internasional Terkait Industri
2.	Jumlah laporan evaluasi produk hukum dan instrumen hukum lainnya bidang industri	2.1. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Bidang Industri
		2.2. Koordinasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bidang Industri
3.	Jumlah laporan layanan informasi dan publikasi hukum	3.1. Melakukan Penyebarluasan Informasi Dan Peraturan Perundang-Undangan
		3.2. Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
4.	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	4.1. Menginventarisasi Dan Menyelesaikan Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian
5.	Tingkat efektivitas organisasi kementerian	5.1. Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
6.	Jumlah laporan penataan organisasi dan tata laksana	6.1. Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
		6.2. 7.1. Melaksanakan Ketatalaksanaan Kementerian Perindustrian
7.	Persentase penyusunan proses bisnis Kementerian Perindustrian	7.1. Melaksanakan Ketatalaksanaan Kementerian Perindustrian
8.	Layanan operasional dan manajemen kinerja biro	8.1. Mengelola Kinerja Biro
		8.2. Menyediakan Peralatan Pengolah Data Dan Informasi
		8.3. Menyediakan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
		8.4. Pembinaan Dan Konsultasi Hukum Dan Organisasi
		8.5. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

Selain indikator kinerja output, Biro Hukum dan Organisasi juga memiliki tanggung jawab terhadap indikator kinerja outcome. Indikator Kinerja *Outcome* pada dasarnya merupakan turunan dari Sasaran Kinerja Sekretariat Jenderal yaitu untuk **“Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian”**. Salah satu indikator sasaran tersebut merupakan tanggung jawab Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Layanan Hukum dan Organisasi yang andal	Persentase peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	95%
	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%
	Tingkat Efektivitas organisasi Kementerian	80%

II.3. RENCANA ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan diatas, tentunya diperlukan dukungan dana. Pada tahun 2017, Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan anggaran sebesar Rp.8.829.223.000,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir

ANGGARAN (DIPA) T.A. 2017

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

(dalam ribuan)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
01	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	8.829.223
1824	Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi	8.829.223
1824.951	Layanan Internal (overhead)	1.623.847
051	<i>Mengelola Kinerja Biro</i>	1.321.847
052	<i>Menyediakan Peralatan Pengolah Data Dan Informasi</i>	231.550
053	<i>Menyediakan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran</i>	70.450
1824.957	Layanan Hukum	4.400.104
001	Layanan Peraturan Perundang-undangan	1.948.426
051	<i>Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri</i>	800.556
052	<i>Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</i>	432.517
053	<i>Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian Di Lingkungan Kementerian Perindustrian</i>	294.480
054	<i>Menyusun Program Legislasi Kementerian Perindustrian</i>	420.873
002	Layanan Evaluasi Produk Hukum Dan Instrumen Hukum Lainnya	868.857
051	<i>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Bidang Industri</i>	400.927
052	<i>Koordinasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Bidang Industri</i>	467.930
003	Pembinaan Hukum	382.220
051	<i>Pembinaan Dan Konsultasi Hukum Dan Organisasi</i>	218.220
052	<i>Berpartisipasi Dalam Sidang Internasional Terkait Industri</i>	164.000
004	Layanan Advokasi Hukum	497.366
051	<i>Menginventarisasi Dan Menyelesaikan Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian</i>	497.366

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
005	Layanan Informasi Dan Publikasi Hukum	703.235
051	Melakukan Penyebarluasan Informasi Dan Peraturan Perundang-undangan	307.101
052	Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (jdih)	396.134
1824.960	Layanan Manajemen Organisasi	1.377.632
051	Penataan Organisasi Kementerian Perindustrian	778.711
052	Melaksanakan Ketatalaksanaan Kementerian Perindustrian	598.921
1824.994	Layanan Perkantoran	1.227.440
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.227.440
1824.999	Output Cadangan	200.200
051	Output Cadangan	200.200
TOTAL		8.829.223

II.4. Dokumen Perjanjian Kinerja

Berdasarkan dari rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi, ditetapkan dokumen perjanjian kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Layanan Legislasi	Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	95%
		Jumlah laporan evaluasi produk hukum dan instrumen hukum lainnya bidang industri	2 Dokumen
		Jumlah laporan layanan informasi dan	1 Dokumen

		publikasi hukum	
2.	Layanan Litigasi	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%
3.	Layanan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat efektivitas organisasi kementerian	80%
		Jumlah laporan penataan organisasi dan tata laksana	1 Dokumen
		Persentase penyusunan proses bisnis Kementerian Perindustrian	80%
4.	Layanan Internal	Jumlah bulan pelaksanaan layanan internal	12 Bulan



III.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Hasil kegiatan yang telah dicapai Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2017 berdasarkan penetapan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Layanan Litigasi dengan indikator kinerja:

- a. Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan

Pada tahun 2017, Biro Hukum dan Organisasi telah mengundangkan 44 Peraturan Menteri Perindustrian dari 46 Peraturan Menteri Perindustrian yang ditetapkan. 2 (dua) Peraturan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link And Match Dengan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/10/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian No.64/M-IND/PER/8/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perindustrian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural Di Lingkungan

Kementerian Perindustrian Dalam Rangka Administrasi
Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian.

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	-	-	95%	95,65%	95%	95%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
001	Layanan Peraturan Perundang-undangan	1.948.426	1.868.029	95,87	95%	95,65%
051	Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri	800.556	782.266	97,72		
052	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	432.517	385.287	89,08		
053	Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	294.480	282.395	95,90		
054	Menyusun Program Legislasi Kementerian Perindustrian	420.873	418.082	99,34		

b. Evaluasi Produk Hukum bidang industri

Pada tahun 2017, Biro Hukum dan Organisasi melakukan 3 evaluasi produk hukum bidang industri yaitu evaluasi perizinan bidang industri, evaluasi kebijakan SNI Wajib dan evaluasi kebijakan klasifikasi industri serta kebijakan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Dalam evaluasi perizinan bidang industri dilandasi adanya perubahan kebijakan terkait pemberian IUI dan izin perluasan industri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Jo PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin

Usaha Industri. Untuk itu perlu segera melakukan revisi atas Permenperin Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sedangkan dalam kebijakan SNI Wajib memerlukan tindak lanjut seiring diterbitkannya PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri. Untuk itu, perlu segera menyiapkan instrumen-instrumen hukum terkait dengan mekanisme pemberlakuan SNI Secara Wajib, termasuk merevisi beberapa ketentuan dalam rangka kelancaran implementasi pemberlakuan SNI Secara Wajib, antara lain penetapan Lembaga Penilai Kesesuaian dan Pemberlakuan SNI.

Dari evaluasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan hidup pada intinya dengan keluarnya PP 46/2017 tentang kebijakan instrumen ekonomi lingkungan hidup berdampak pada kegiatan industri karena adanya kewajiban penyediaan sejumlah dana yang dipersiapkan untuk memperbaiki lingkungan hidup yang rusak atau tercemar akibat kegiatan usahanya.

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Evaluasi Produk Hukum bidang industri	3 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
002	Layanan Evaluasi Produk Hukum Dan Instrumen Hukum Lainnya	868.857	828.923	95,40	2	2
051	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Bidang Industri	400.927	396.586	98,92	1	1
052	Koordinasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Bidang Industri	467.930	432.338	92,39	1	1

c. Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Biro Hukum dan Organisasi juga melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi dimana di Tahun 2017 sebanyak 41 individu/instansi yang meminta konsultasi produk hukum terkait industri, dan sebanyak 362.538 kali download peraturan pada website JDIH Kementerian Perindustrian.

Selain itu, Biro Hukum dan Organisasi juga melakukan Penyuluhan Hukum tentang Saber Pungli dan Sosialisasi PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
005	Layanan Informasi Dan Publikasi Hukum	703.235	693.826	98,66	1	1
051	Melakukan Penyebarluasan Informasi Dan Peraturan Perundang-undangan	307.101	298.579	97,22		
052	Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (jdih)	396.134	395.247	99,78		

2. Meningkatnya kualitas layanan advokasi dan bantuan hukum dengan indikator kinerja Persentase kasus hukum yang diselesaikan

Pada tahun 2017, Biro Hukum dan Organisasi melayani permintaan konsultasi dan advokasi hukum terhadap 6 pendampingan permasalahan hukum dan 1 kasus Litigasi yang terselesaikan, namun ada 1 kasus litigasi yang belum selesai dikarenakan menunggu proses putusan dari pengadilan.

Rincian kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan PT Barata Indonesia

Telah diselesaikan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 3520/K/PDT/2015 tanggal 14 Juni 2016 yang menerima permohonan Kasasi dari Kementerian Perindustrian dan PT Barata Indonesia (Persero) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2014/PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.GS;

- 2) Pendampingan CV Supra Ideal

Pada pokoknya Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian mengirimkan surat kepada Ditreskrimsus Polda Sumatra Selatan yang pada intinya menyatakan bahwa ubin keramik bukan kualitas pertama yang tidak berlogo SNI dapat tetap diperjualbelikan sepanjang mutu tampak dan dimensinya memenuhi persyaratan mutu sebagaimana diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/12/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ubin Keramik Secara Wajib.

3) Pendampingan PT Gunung Raja Paksi

Perkembangan terakhir dari permasalahan bea masuk PT Gunung Raja Paksi akan dilimpahkan kepada Pokja II Satuan Tugas Efektivitas dan Pecepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi karena terkait dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dilakukannya restitusi.

4) Pendampingan Pengusaha Perorangan

Perkembangan terakhir dari pendampingan ini yaitu Direktorat Tipidter Mabes Polri menolak untuk menguji sampel terompet mainan anak di Balai Besar Kimia dan Kemasan dan memutuskan untuk melanjutkan penyidikan tanpa melibatkan Kementerian Perindustrian.

5) PT Indo Bharat Rayon

Kementerian Perindustrian, diwakili oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, serta Biro Hukum dan Organisasi melakukan pendampingan terhadap PT Indo Bharat Rayon dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang diadakan pada tanggal 4 Januari 2017. Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa perusahaan harus mematuhi putusan pengadilan, namun sebagai pembina industri nasional Kementerian Perindustrian selalu mendorong agar terus bertumbuhnya industri di berbagai sektor, termasuk industri kimia.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian akan memimpin tim untuk melakukan kunjungan ke perusahaan dalam rangka melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari alternative solusi kebijakan atas permasalahan PT Indo Bharat Rayon terkait limbah PLTU berupa fly-ash dan bottom-ash dan juga air pencucian batu bara karena hujan sehingga kejadian yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan berakibat tuntutan pidana dan/atau perdata tidak terulang kembali

6) Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomo 3520/K/PDT/2015

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Biro Hukum dan Organisasi telah menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali (penggugat) kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Gresik. Pada tanggal 5 September 2017, Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Gresik sebelum seluruh berkas perkara Peninjauan Kembali diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus perkaranya.

7) Perkara Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim

Melalui Putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak permohonan

Para Penggugat dan memenangkan Para Tergugat, termasuk Kementerian Perindustrian. Saat ini Para Penggugat telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Kementerian Perindustrian telah menyusun Kontra Memori Banding dan telah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 November 2017.

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Persentase kasus hukum yang diselesaikan	-	-	90%	85,7%	90%	90%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
004	Layanan Advokasi Hukum	497.366	493.834	99,29	90%	85,7%
051	<i>Menginventarisasi Dan Menyelesaikan Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian</i>	497.366	493.834	99,29		

3. Layanan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator kinerja.

a. Tingkat efektivitas organisasi kementerian

Tingkat efektivitas organisasi Kementerian Perindustrian dihitung berdasarkan perbandingan presentase tugas dan fungsi dengan tugas non tugas dan fungsi dari setiap pegawai di Kementerian Perindustrian yang diisi melalui aplikasi kinerja di intranet.kemenperin.go.id. Kemudian data tersebut diolah menjadi data tingkat efektivitas organisasi Kementerian.

INDIKATOR	2016		2017	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Tingkat efektivitas organisasi kementerian	-	-	80%	80,5%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
051	Penataan Organisasi Kementerian Perindustrian	778.711	777.279	99,82	80%	80,5%

b. Jumlah laporan penataan organisasi dan tata laksana

Pada tahun 2017 telah dibentuk organisasi baru yaitu Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru melalui Permenperin Nomor 26/M-IND/PER/7/2017.

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Jumlah laporan penataan organisasi dan tata laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
1824.960	Layanan Manajemen Organisasi	1.377.632	1.374.889	99,80	1	1
051	Penataan Organisasi Kementerian Perindustrian	778.711	777.279	99,82		
052	Melaksanakan Ketatalaksanaan Kementerian Perindustrian	598.921	597.610	99,78		

c. Persentase penyusunan proses bisnis Kementerian Perindustrian

Fokus penyusunan proses bisnis pada tahun 2017 baru pada unit organik Kementerian Perindustrian. Kegiatan penyusunan proses bisnis di lingkungan Kementerian Perindustrian diawali dengan kegiatan Awareness dan Pengumpulan Data yang diselenggarakan pada bulan Juni 2017.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta rapat tentang Bussines Process Management dan sekaligus melakukan reuiu terhadap proses bisnis Kementerian Perindustrian yang telah disusun pada tahun 2016, dengan harapan hasil reuiu dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan Bussines Process Management Kementerian Perindustrian yang baru. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya draft Peta Bisnis Proses Kementerian Perindustrian Level 0 (L0) yang akan dijadikan dasar penyusunan bisnis proses level 1 (L1) sampai dengan level 4 (L4).

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Persentase penyusunan proses bisnis Kementerian Perindustrian	-	-	80%	80%	90%	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
052	Melaksanakan Ketatalaksanaan Kementerian Perindustrian	598.921	597.610	99,78	80%	80%

4. Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi dengan indikator kinerja bulan layanan.

Pada tahun 2017 telah dilakukan layanan manajemen kinerja dan operasional perkantoran selama 12 bulan.

INDIKATOR	2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
Bulan Layanan	12 Bulan					

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	ANGGARAN			OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
1824.951	Layanan Internal (overhead)	1.623.847	1.615.496	99,49	12	12
051	Mengelola Kinerja Biro	1.321.847	1.315.920	99,55		
052	Menyediakan Peralatan Pengolah Data Dan Informasi	231.550	230.976	99,75		
053	Menyediakan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	70.450	68.600	97,37		
1824.994	Layanan Perkantoran	1.227.440	1.217.192	99,17	12	12
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.227.440	1.217.192	99,17		

Berikut rekapitulasi matrik pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Layanan Legislasi	Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	95%	95,65%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Jumlah laporan evaluasi produk hukum dan instrumen hukum lainnya bidang industri	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah laporan layanan informasi dan publikasi hukum	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Layanan Litigasi	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	85,7%
3.	Layanan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat efektivitas organisasi kementerian	80%	80,5%
		Jumlah laporan penataan organisasi dan tata laksana	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase penyusunan proses bisnis Kementerian Perindustrian	80%	80%
4.	Layanan Internal	Jumlah bulan pelaksanaan layanan internal	12 Bulan	12 Bulan

B. Analisis Capaian

Berdasarkan dari apa yang telah dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2017, idealnya semua target indikator kinerja dapat tercapai. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu Presentase kasus hukum yang diselesaikan. Hal tersebut terjadi karena lamanya proses putusan pengadilan;

III.2. Akuntabilitas Anggaran

Tahun anggaran 2017, Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.829.223.000,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.453.663.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau 95,75% dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A. 2017
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
(dalam ribuan)

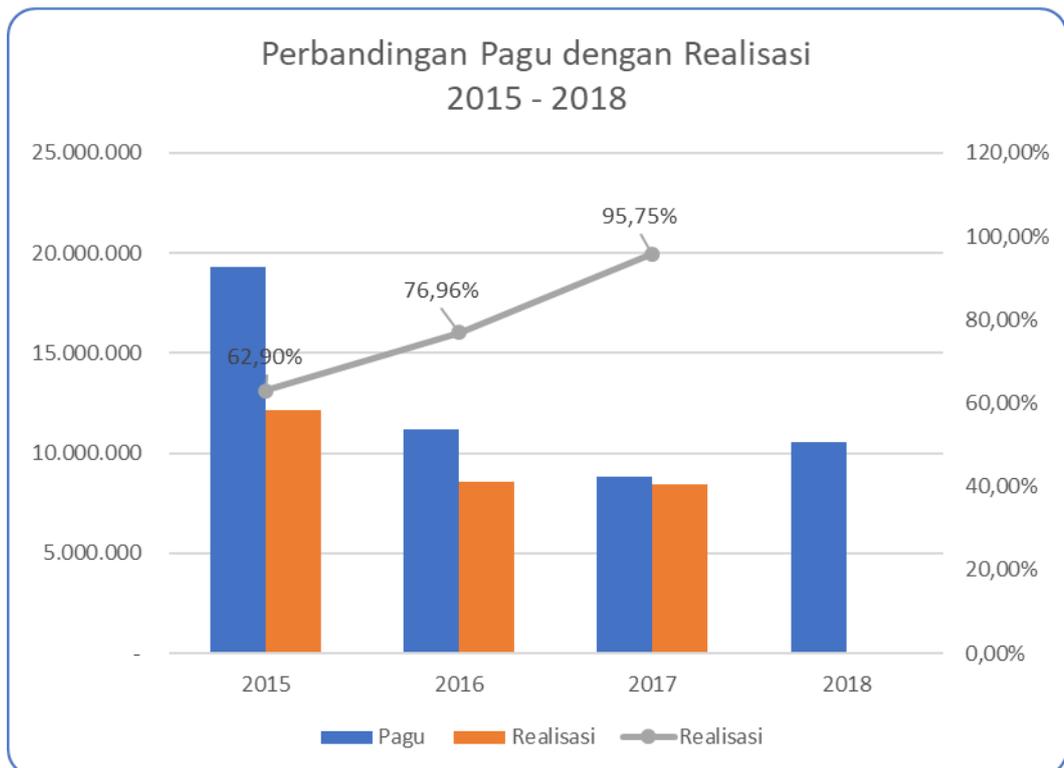
KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	TOTAL	%
01	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	8.829.223	8.453.663	95,75
1824	Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi	8.829.223	8.453.663	95,75
1824.951	Layanan Internal (overhead)	1.623.847	1.615.496	99,49
051	Mengelola Kinerja Biro	1.321.847	1.315.920	99,55
052	Menyediakan Peralatan Pengolah Data Dan Informasi	231.550	230.976	99,75
053	Menyediakan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	70.450	68.600	97,37
1824.957	Layanan Hukum	4.400.104	4.246.087	96,50
001	Layanan Peraturan Perundang-undangan	1.948.426	1.868.029	95,87
051	Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri	800.556	782.266	97,72
052	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	432.517	385.287	89,08

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	TOTAL	%
053	Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	294.480	282.395	95,90
054	Menyusun Program Legislasi Kementerian Perindustrian	420.873	418.082	99,34
002	Layanan Evaluasi Produk Hukum Dan Instrumen Hukum Lainnya	868.857	828.923	95,40
051	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Bidang Industri	400.927	396.586	98,92
052	Koordinasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Bidang Industri	467.930	432.338	92,39
003	Pembinaan Hukum	382.220	361.475	94,57
051	Pembinaan Dan Konsultasi Hukum Dan Organisasi	218.220	197.862	90,67
052	Berpartisipasi Dalam Sidang Internasional Terkait Industri	164.000	163.613	99,76
004	Layanan Advokasi Hukum	497.366	493.834	99,29
051	Menginventarisasi Dan Menyelesaikan Permasalahan Hukum Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian	497.366	493.834	99,29
005	Layanan Informasi Dan Publikasi Hukum	703.235	693.826	98,66
051	Melakukan Penyebarluasan Informasi Dan Peraturan Perundang-undangan	307.101	298.579	97,22
052	Mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (jdih)	396.134	395.247	99,78
1824.960	Layanan Manajemen Organisasi	1.377.632	1.374.889	99,80
051	Penataan Organisasi Kementerian Perindustrian	778.711	777.279	99,82
052	Melaksanakan Ketatalaksanaan Kementerian Perindustrian	598.921	597.610	99,78
1824.994	Layanan Perkantoran	1.227.440	1.217.192	99,17
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.227.440	1.217.192	99,17
1824.999	Output Cadangan	200.200	0	0,00
051	Output Cadangan	200.200	0	0,00
	TOTAL	8.829.223	8.453.663	95,75

Capaian realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi TA 2017 bisa dikatakan sudah cukup optimal, dimana dari anggaran Rp.8.829.223.000,-, yang bisa digunakan hanya Rp.8.629.023.000,- dimana Rp.200.200.000,- merupakan output cadangan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2017 meningkat cukup signifikan sebesar 18.79%.

Unit Kerja	2015			2016			2017			2018
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu
Biro Hukum dan Organisasi	19.288.388	12.133.162	62,9	11.198.365	8.594.991	76,96	8.829.223	8.453.663	95,75	10.538.544

*dalam ribuan.



Anggaran Biro Hukum dan Organisasi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya kendala dari faktor internal dan eksternal:

a. Faktor internal

- 1) SDM pada Biro Hukum dan Organisasi yang jumlahnya terbatas, serta masih terdapat SDM Biro Hukum dan Organisasi yang melaksanakan tugas belajar.
- 2) Perencanaan kegiatan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi yang tidak matang.

b. Faktor eksternal:

- 1) Pelaksana kegiatan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan masih bergantung pada jadwal yang ditetapkan oleh K/L terkait sesuai dengan substansi yang sedang dibahas.
- 2) Pelaksanaan kegiatan (khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum) menunggu ketersediaan bahan/masukan dari unit kerja lain. Misalkan dalam rapat antar kementerian.
- 3) Kebijakan pemerintah terkait dengan pengurangan anggaran menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
- 4) Adanya penugasan-penugasan diluar pekerjaan yang telah dijadwalkan.
- 5) Adanya output cadangan yang tidak dapat dipergunakan, sehingga realisasi anggaran tidak optimal

III.3. Hasil Kuesioner

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Biro Hukum dan Organisasi, kami mengirimkan kuesioner kepuasan pelanggan tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kuesioner dikirimkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu 91 unit pusat dan UPT.

2. Dari 91 unit kerja yang dikirim kuesioner, hanya 66 unit kerja yang mengembalikan dan mengisi kuesioner.
3. Hasil kuesioner tersebut menghasilkan **3,51** dengan skala 4 yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Biro Hukum dan Organisasi memuaskan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Laporan Akuntabilitas Intransi Pemerintah ini, diketahui realisasi fisik pada kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang bervariasi. Dan tidak seluruh target pada indikator kinerja tercapai, sedangkan untuk realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi mencapai 95,75% dengan segala kendala telah kami jelaskan pada Bab III.

Disamping itu, dengan hasil kuesioner yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan Biro Hukum dan Organisasi memuaskan mengindikasikan bahwa kinerja Biro Hukum dan Organisasi telah baik

B. Saran

Laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Biro Hukum dan Organisasi sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan 2018.

Dengan segala keterbatasan SDM Biro Hukum dan Organisasi, diharapkan Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan tambahan pegawai yang dapat meningkatkan kinerjanya.

Disamping itu, perlu dilaksanakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja tiap bagian secara periodik.